**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)**

**DESA WONOGIRI KECAMATAN KAJORAN**

**KABUPATEN MAGELANG**

**TAHUN 2025**

****

**DISUSUN OLEH :**

**PEMERINTAH DESA WONOGIRI**

**KECAMATAN KAJORAN KABUPATEN MAGELANG**

**Dsn. Salakan RT 22 Ds.Wonogiri Kec.Kajoran Kab.Magelang**

**Email: pemerintahdesawonogiri@gmail.com**

**TAHUN 2024**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

**DESA WONOGIRI KECAMATAN KAJORAN**

**KABUPATEN MAGELANG**

**NOMOR : 01 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**KESEPAKATAN**

**RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKPDes )**

**DESA WONOGIRI KECAMATAN KAJORAN KABUPATEN MAGELANG**

**TAHUN 2025**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOGIRI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Menimbang** | **:** |  | bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa; |
|  |  |  | bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun: |
|  |  |  | bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Wonogiri Tahun 2025. |
|  |  |  | bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan Kepala Desa perlu dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD tentang RKP Desa Tahun 2025. |
|  |  |  | Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD |
| **Mengingat** | **:** |  | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104); |
|  |  |  | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; |
|  |  |  | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; |
|  |  |  | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; |
|  |  |  | Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; |
|  |  |  | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; |
|  |  |  | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa; |
|  |  |  | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa |
|  |  |  | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; |
|  |  |  | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; |
|  |  |  | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa; |
|  |  |  | Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005- 2025; |
|  |  |  | Peraturan Bupati Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ( Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 5); |
|  |  |  | Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa; |
|  |  |  | Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang; |
|  |  |  | Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026; |
|  |  |  | Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. |
|  |  |  | Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; |
|  |  |  | Keputusan Bupati Magelang Nomor : 180.182/155/KEP/13/2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; |
|  |  |  | Surat Edaran Sekretariat Daerah Nomor Nomor : 050/1699/13/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (PERUBAHAN RPJM DESA), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA) Tahun 2025 Dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DU RKP DESA) Tahun 2026 |
|  |  |  | Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonogiri Tahun Anggaran 2024; |
|  |  |  | Peraturan Kepala Desa Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonogiri Tahun Anggaran 2024; |

**MEMUTUSKAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : |  |
| KESATU | : | MEMBAHAS RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (Rkpdes) TAHUN 2025 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA. |
| KEDUA | : | MENYEPAKATI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2025 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA. |
| KETIGA | : | KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Disepakati di : Wonogiri  Pada Tanggal : 13 September 2024 |
|  | BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )  DESA WONOGIRI  KETUA  **BAMBANG PRIYANTO** |

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD**

Nomor : 180.192/ 198 /2001 / 2024

Nomor : / BPD.S/ IX/2024

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

DESA WONOGIRI

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA(RKPDesa)

DESA WONOGIRI KECAMATAN KAJORAN KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2025

Pada hari ini Jum’at tanggal tiga belas bulan september tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. JUNARSIH : Kepala Desa Wonogiri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Wonogiri selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. BAMBANG PRIYANTO : Ketua / ~~Wakil Ketua~~ / ~~Anggota~~ BPD Desa Wonogiri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wonogiri selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati RKPDesa 2025 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.

2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan RKPDesa 2025 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.

3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKPDesa 2025 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda tangani Berita Acara ini.

4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Kajoran untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

|  |  |
| --- | --- |
| **PIHAK PERTAMA**  **JUNARSIH** | **PIHAK KEDUA**  **BAMBANG PRIYANTO** |

|  |
| --- |
| https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRapJfze96iyQbvbTsdrHRRTpABmecbnLshRrNMFVqyprdRXKMu |

### PERATURAN DESA WONOGIRI

**NOMOR 04 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa)**

**DESA WONOGIRI KECAMATAN KAJORAN KABUPATEN MAGELANG**

**TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA WONOGIRI,**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : |  | bahwa pemerintah desa wajib menyusun dokumen perencanaan pemerintah desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan dasar dari Pembuatan Peraturan Desa Anggaran Dasar dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025; |
|  |  |  | bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dilakukan oleh tim penyusun RKPDes dalam hal ini adalah yang ditunjuk dalam Musrenbangdes tahun 2024, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa Penyusunan RKPDesa; |
|  |  |  | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana huruf a dan b, perlu membuat peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) oleh Kepala Desa; |
| Mengingat | : |  | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104); |
|  |  |  | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; |
|  |  |  | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; |
|  |  |  | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; |
|  |  |  | Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; |
|  |  |  | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; |
|  |  |  | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa; |
|  |  |  | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa |
|  |  |  | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; |
|  |  |  | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; |
|  |  |  | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa; |
|  |  |  | Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005- 2025; |
|  |  |  | Peraturan Bupati Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ( Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 5); |
|  |  |  | Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa; |
|  |  |  | Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang; |
|  |  |  | Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026; |
|  |  |  | Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. |
|  |  |  | Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; |
|  |  |  | Keputusan Bupati Magelang Nomor : 180.182/155/KEP/13/2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; |
|  |  |  | Surat Edaran Sekretariat Daerah Nomor Nomor : 050/1699/13/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (PERUBAHAN RPJM DESA), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA) Tahun 2025 Dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DU RKP DESA) Tahun 2026 |
|  |  |  | Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonogiri Tahun Anggaran 2024; |
|  |  |  | Peraturan Kepala Desa Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonogiri Tahun Anggaran 2024; |

**Dengan Kesepakatan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOGIRI**

**dan**

**KEPALA DESA WONOGIRI**

**MEMUTUSKAN :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) DESA WONOGIRI KECAMATAN KAJORAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025 |
|  |  |

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang
2. Pemerintah Daerah adalahPemerintah Kabupaten Magelang
3. Bupati adalah Bupati Magelang
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Magelang
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakt setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hakasal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara KesatuanRepublik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsure penyelenggaraan pemerintahan desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BadanPermusyawaratanDesa;
12. Perubahan Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.

**BAB II  
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPDesa**

**Pasal 2**

1. Rencana RKP-Desa dapat disusun oleh Pemerintahan Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa yang ditunjuk dalam Musrenbangdesa yang terdisri dari unsure Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat/kelembagaan desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
2. Dalam menyusun rancangan RKP-Desa, Tim Penyususn RKP Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RKP-Desa yang berasal dari Tim Penyusunan RKPDesa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa
4. Setelah membahas dan menyepakati rancangan RKP-Desa, dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa, maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang RKPDesa Tahun 2023 dalam bentuk Dokumen RKPDesa;
5. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta Unsur Masyarakat;
6. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa menetapkan RKP –Desa dalam peraturan desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundangkan dalam Lembaran Desa.

**BAB III  
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN**

**Pasal 3**

1. BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa dalam mengambil keputusan;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

**BAB IV**

**VISI DAN MISI**

##### Pasal 4

Visi : “TERWUJUDNYA DESA WONOGIRI YANG LEBIH MAJU DAN MANDIRI”

##### Pasal 5

Misi :

1. Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa ;
2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat;
3. Peningkatan sumber daya manusia;
4. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Desa;
5. Pelestarian dan pengembangan kebudayaan desa;
6. Optimalisasi sumber daya alam pertanian dan perikanan;
7. Pengembangan Sektor Wisata Desa dan UMKM;
8. Pengembangan BUMDesa;

**BAB V**

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**Pasal 6**

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kwalitas dan kwantitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Lembaga Desa dan Kelembagaan Desa ;
2. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatkan sumber daya manusia melalui Pemberdayaan Masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan Sarana dan Prasarana Desa agar desa menjadi maju dan mandiri;
5. Melaksanakan Pelestarian dan pengembangan kebudayaan desa;
6. Terwujudnya optimalisasi sumber daya alam Peternakan pertanian dan perikanan;
7. Terwujudnya Sektor Wisata Desa dan UMKM di beberapa lapisan masyarakat;
8. Terwujudnya pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) untuk kesejahteraan masyarakat Desa ;

**Pasal 7**

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Belanja operasional Pemerintahan Desa;
6. Belanja operasional Pemerintahan Desa yang bersumber dari Dana Desa;
7. Program Pelayanan Dasar;
8. Program pelayanan dasar infrastruktur;
9. Program kebutuhan primer pangan;
10. Program pelayanan dasar pendidikan;
11. Penguatan BUMDesa;
12. Program peningkatan pelayanan kesehatan;
13. Program kebutuhan primer Sandang;
14. Program Ekonomi produktif;
15. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
16. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
17. Program dana bergulir;
18. Program pembangunan moral dan akhlak
19. Program pembangunan infrastruktur berkelanjutan
20. Program Ketahanan Pangan Desa;
21. Program Penanganan Kebencanaan, Darurat dan Mendesak
22. Pencegahan dan Penaggulangan Covid-19
23. Percepatan penguatan ekonomi masyarakat pasca dampak covid-19
24. Bantuan Langsung Tunai;
25. Program Penanganan dan Penanggulangan Bencana di Desa;
26. Keadaan Mendesak Desa.

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKPDesa ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

**Pasal 10**

Peraturan Desa tentang RKPDesa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

  Ditetapkan di : Wonogiri

Pada tanggal : 24 September 2024

KEPALA DESA WONOGIRI

J U N A R S I H

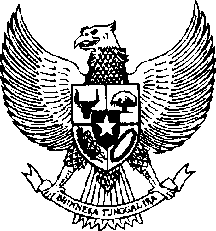
Diundangkan di : Desa Wonogiri

Pada tanggal : 24 September 2024

Sekretaris Desa

MUHAMMAD KHUSNI AL AMIN

LEMBARAN DESA WONOGIRI NOMOR 04 TAHUN 2024



KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOGIRI

NOMOR : 180.192/ 29 /KEP/001/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2025

DESA WONOGIRI KECAMATAN KAJORAN KABUPATEN MAGELANG

KEPALA DESA WONOGIRI;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa; 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025, Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang; | | |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa; 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan; 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa; 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005- 2025; 14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ( Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 5); 15. Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa; 16. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang; 17. Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026; 18. Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. 19. Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; 20. Keputusan Bupati Magelang Nomor : 180.182/155/KEP/13/2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 21. Surat Edaran Sekretariat Daerah Nomor Nomor : 050/1699/13/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (PERUBAHAN RPJM DESA), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA) Tahun 2025 Dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DU RKP DESA) Tahun 2026 22. Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonogiri Tahun Anggaran 2024; 23. Peraturan Kepala Desa Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonogiri Tahun Anggaran 2024; | | |
| Memperhatikan | : | Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025 pada Tanggal 1 Juli 2024 yang bertempat di Balai Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang. | | |
|  |  | **MEMUTUSKAN** | | |
| Menetapkan | : |  | | |
| KESATU | : | Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. | | |
| KEDUA | : | Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa TAHUN 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:   1. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa; 2. pencermatan ulang RPJM Desa; 3. penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa; dan 4. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan. | | |
| KETIGA | : | Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) TAHUN 2025 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 dan Swadaya Desa. | | |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. | | |
|  | | | |  |  | | --- | --- | | Ditetapkan di | : Desa Wonogiri | | Pada tanggal | : 01 Juli 2024 | | KEPALA DESA WONOGIRI  J U N A R S I H | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lampiran | : | Keputusan Kepala Desa Wonogiri |
| Nomor | : | 180.192/ 29 /KEP/001/2024 |
| Tanggal | : | 01 Juli 2024 |
| Tentang | : | Pembentukan Tim Penyusun RKP DESA Tahun 2025 |

KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2025

DESA WONOGIRI KECAMATAN KAJORAN

KABUPATEN MAGELANG

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA | ALAMAT | JABATAN | UNSUR |
|  | M. KHUSNI AL AMIN | SABRANG | Ketua | Sekretaris Desa |
|  | MAKMURON | TANGKIL | Sekretaris | Perangkat Desa |
|  | NURIL IMRON, S.Pd.I | TUWANAN | Anggota | Perangkat Desa |
|  | ANANG TURKHOLIS | TUWANAN | Anggota | Perangkat Desa |
|  | KHANIF MASYKUR | SABRANG | Anggota | Toma |
|  | EVI LAILATUL FITRIYA | TUWANAN | Anggota | Tokoh Perempuan |
|  | MAKDUDAT | TUWANAN | Petugas Administrasi | Toma |
|  | SABAR AMINUDIN | NGEMPLAK | Petugas Administrasi | Toma |
|  | AGUS MAKRIFATULLOH | SALAKAN | Petugas Administrasi | Toma |
|  | ALWI ASHAR | SABRANG | Petugas Administrasi | Toma |
|  | ADRI SETIABUDI | TUWANAN | Petugas Administrasi | Pemuda |

KEPALA DESA WONOGIRI

( JUNARSIH )